

Peran Perempuan Mesir dalam Konstruksi Sosial Pascakolonial

Dzulkifli M. Mooduto

Universitas Hasanuddin Makassar

Correspondence: nhoenahdliyin@gmail.com

Article History **Abstract**

Submitted:
04/09/2018
Reviewed:
02/10/2018
Approved:
04/12/2018

*This study discusses about the resistance of Egyptian women against social inequality that occurred in two different places with different problems, as depicted in the novel *Ar-Rihlah Ayyamu Talibah Misriyyah fi Amrika* Radwa 'Asyur's work. The study reveals the forms of social inequality and also explains clearly the forms of resistance by using the post-colonial theory of Spivak and Homi K. Bhabha which is presented descriptively by deconstructing every fact in this fiction work of *Ar-Rihlah Ayyamu Talibah Misriyyah fi Amrika*. The result of this study indicated that the resistance to social inequality in terms of gender could be done by frontal. In addition, it also could be done by distorting the common view of women in the social construct of patriarchal society by demonstrating the self capacity and capability. As for the resistance to social inequality in terms of racism also be done in two ways: the first is frontal; and the second is in a way of imitation or mimicry about the West. The forms of imitation are displayed in novel *Ar-Rihlah Ayyamu Talibah Misriyyah fi Amrika* namely: the first is mimicry about the way of dressing; the second is mimicry to taste the food; and the third is mimicry towards a language. The mimicry toward the West that is done by a leader; Radwa apart as a form of equalization himself with the West to be "objectionable", and also becomes a form of banter (Mockery) against the West for being "inappropriate". Thus, the mimicry efforts undertaken Radwa into a form of resistance because impersonation he did not mimic entirely because he was different from the West.*

Keywords: *Woman, Radwa 'Asyur, Social Inequality, postcolonial, resistance.*

Abstrak

*Artikel ini membahas tentang resistensi perempuan Mesir terhadap ketimpangan sosial yang terjadi di dua tempat yang berbeda dengan permasalahan yang juga berbeda sebagaimana tergambar dalam novel *Ar-Rihlah: Ayyamu Talibah Misriyyah fi Amrika* karya Radwa 'Asyur. Penyingkapan bentuk-bentuk ketimpangan sosial dan juga paparan bentuk-bentuk resistensi dengan menggunakan sudut pandang teori pascakolonial Spivak dan Homi K. Bhabha yang disajikan secara deskriptif dengan mendekonstruksi setiap fakta yang terdapat dalam karya fiksi *Ar-Rihlah: Ayyamu Talibah Misriyyah fi Amrika**

merupakan kajian utama yang dilakukan dalam artikel ini. Hasilnya menunjukkan bahwa resistensi terhadap ketimpangan sosial dalam hal gender dapat dilakukan dengan cara frontal. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara mendistorsi pandangan umum terhadap perempuan dalam konstruk sosial masyarakat patriarki dengan menunjukkan kapasitas dan kapabilitas diri. Adapun resistensi terhadap ketimpangan social dalam hal rasisme juga dilakukan dengan dua cara: pertama, secara frontal; dan yang kedua dengan cara peniruan atau mimikri terhadap Barat. Bentuk-bentuk peniruan yang ditampilkan dalam novel ar-Rihlah: Ayyamu Talibah Misriyyah fi Amri ka yaitu: pertama, mimikri terhadap cara berpakaian; kedua, mimikri terhadap selera makanan; dan ketiga, mimikri terhadap bahasa. Mimikri terhadap Barat yang dilakukan tokoh Radwa selain sebagai bentuk penyeteraan dirinya dengan Barat agar menjadi pantas, juga menjadi bentuk olok-olok (mockery) terhadap Barat karena menjadi tidak pantas. Dengan demikian, upaya mimikri yang dilakukan Radwa menjadi sebuah bentuk resistensi karena peniruan yang dia lakukan tidak dapat menyerupai sepenuhnya karena dirinya berbeda dari Barat.

Kata kunci: Perempuan, Radwa 'Asyur, Ketimpangan Sosial, Poskolonial, Resistensi.

PENDAHULUAN

Dalam banyak diskursus, perempuan Mesir memberikan banyak karakteristik dan memperlihatkan banyak masalah yang sama dalam hal ketidaksetaraan gender sebagaimana yang dialami oleh perempuan-perempuan di negara Arab-Islam yang lain. Ketika Mesir ditaklukkan oleh Arab pada tahun 640 M dan datang dengan membawa pengaruh Islam, hal ini sangat berpengaruh terhadap aturan dan status perempuan. Banyak catatan sejarah mengungkapkan fakta bahwa perempuan pada permulaan Islam di Arab dan negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Arab memegang peranan aktif, baik dalam kehidupan sosial maupun politik di masyarakat. Akan tetapi, pada periode berikutnya selama masa kekuasaan Turki, kekeliruan penafsiran terhadap Alquran dan beberapa literatur Islam lainnya memastikan adanya kemunduran dalam hal kehidupan keluarga dan kehidupan perempuan. Mesir yang berada di bawah aturan Turki dan merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1517, melebih-lebihkan penafsiran terhadap Alquran, terutama kalimat yang berhubungan dengan perempuan (Abdel Kader via Kader, 1987:8).

Selain itu, pada abad ke-19, yang banyak ditampilkan dalam catatan sejarah mengenai perempuan Mesir adalah perempuan *hareem*. *Hareem* sebagai bagian dari kelas atas dalam strata sosial perempuan, keberadaan mereka tidak lebih dari 2% dari lima juta populasi perempuan di Mesir. Akan tetapi, sejarawan dan para peneliti lain telah menunjukkan kesamaan hasil bahwa perempuan *hareem* mayoritas adalah perempuan Mesir.

Kehidupan mereka pada abad tersebut stagnan, terasing, dibatasi ruang gerakannya, bahkan rumah mereka diselubungi oleh sekat-sekat (Kader, 1987:17).

Ada beberapa pembenaran terhadap persoalan ini, bahkan cenderung menyamaratakan kelas atas perempuan *hareem* dengan semua kehidupan perempuan Mesir. Meskipun pengaruh perempuan *hareem* tidak signifikan, tetapi dalam suatu hierarki sosial patriarki, apa yang dilakukan golongan atas/elit dianggap ideal oleh golongan lain. Hal ini menunjukkan adanya persoalan yang sangat besar dalam simbol strata (Kader, 1987:17).

Deskripsi terhadap kehidupan perempuan *hareem* telah menjadi sesuatu yang bersifat klise, baik yang berada di Mesir atau di belahan dunia Arab-Islam lain. Kata *hareem* sendiri diambil dari kata dalam bahasa Arab yaitu *haram*, yang berarti tempat ibadah atau kota suci. Seperti Ka'bah di Mekkah dan masjid Nabawi di Madinah adalah *haramain*; karena dijadikan sebagai tempat ibadah bagi siapa saja yang mencari perlindungan di dalamnya agar terbebas dari siksaan, dan *haram* juga berarti larangan. Inilah dua pandangan terhadap asal pemberian kata *hareem*. Adapun makna utamanya adalah terpisahnya beberapa bagian dari perempuan yaitu tidak lebih dari sekedar ibu rumah tangga, atau perempuan bagi para lelaki dan anak-anaknya. Dalam hal ini, sejarawan Barat menghubungkan *hareem* dengan poligami, pergundikan, dan cenderung menggambarkan *hareem* sebagai “tempat memuaskan nafsu birahi, di mana para budak perempuan berbaring dengan pose yang menggairahkan sebagaimana harapan tuan mereka yang berkunjung” (Kader, 1987:18).

Ottoman sebagai pemerintah yang memiliki kuasa penuh tidak hanya mencanangkan sebagian besar administrasi berupa dekret yang bertujuan untuk menindas perempuan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjadikan *hareem* sebagai sebuah lembaga yang memasukkan para perempuan dan diorganisir di lingkungan masyarakat dengan menjadikan perempuan sebagai objek seksual saja. Dari sekian banyak perempuan yang berada di dalam lembaga *hareem* ini, hanya segolongan perempuan yang berparas cantik yang dipilih dan dipersiapkan untuk menyenangkan dan melayani sultan. Para perempuan ditempatkan di sebuah tempat yang diumpamakan seperti bentuk piramida. Pada dasar piramida terdapat orang-orang baru (*sagridelar*) dan di bagian atas terdapat beberapa perempuan favorit sultan (*ikbale*) (Kader, 1987:18).

Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat patriarki seperti kekaisaran Ottoman ini. Peran laki-laki adalah sebagai pemberi nafkah dan sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk bekerja di bidang publik, bekerja di luar rumah untuk menyediakan

segala keperluan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Adapun perempuan fungsi utamanya adalah menjadi istri yang baik dan yang paling penting adalah melahirkan anak-anak. Selain itu, demi penampilan yang lebih baik, peran pertama – dipilih dan menjadi perempuan yang diinginkan dan kemudian dijadikan istri – adalah perempuan yang bersikap manja dan mempercantik diri. Para perempuan dalam lembaga *hareem* kebanyakan menghabiskan sebagian dari waktu mereka untuk menyeleksi, mencoba, dan membeli pakaian dari *dalala* atau pedagang wanita yang berada di sekitar wilayah *hareem* (Kader, 1987: 25-26).

Seperti itulah yang terjadi pada masa kekaisaran Ottoman hingga akhir abad ke-19. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Qasim Amin (via Kader, 1987:21) bahwa para perempuan hampir keseluruhan ditonjolkan oleh lelaki. Mereka tidak mendapatkan tempat di dunia luar kecuali di sudut-sudut rumah – tempat yang mereka tinggali terselimuti kegelapan dan kebodohan yang sangat dalam – di mana lelaki menggunakan mereka untuk kesenangan seksualitas pada saat tertentu dan membuang para perempuan itu di jalanan, jika mereka menginginkan hal itu. Kebebasan lelaki diperhitungkan dengan perbudakan perempuan; tingkat pendidikan lelaki diperhitungkan dengan ketidaktahuan perempuan. Lelaki membangun kepercayaan diri mereka dengan rasionalitas dan kemampuan mental mereka, tinggal demi seorang perempuan adalah kebodohan dan penghambat. Hal yang penting bagi laki-laki adalah otoritas dan martabat, sedangkan bagi perempuan adalah kesabaran dan ketaatan. Perumpamaan kecerdasan dan jarak surga bagi laki-laki yaitu ketika perempuan hanya berada dalam kegelapan dan hukuman penjara. Sementara itu, keseluruhan alam bagi laki-laki yaitu ketika perempuan menempati batas dan sudut-sudut gelap.

Selanjutnya, Qasim Amin mengemukakan bahwa hal itu adalah bagian dari cara laki-laki memandang rendah perempuan. Ketika mereka memiliki perempuan, yang terjadi adalah para lelaki melarang para perempuannya menggeluti pekerjaan yang menjadi tanggung jawab lelaki dan pekerjaan yang berhubungan dengan dunia luar. Perempuan tidak bisa mengatakan apa pun meskipun mereka memiliki urusan dengan dunia luar, mereka dianggap tidak memiliki kecerdasan, tidak punya kepekaan terhadap seni, tidak ada aturan di kehidupan publik, tidak ada aturan dalam kehidupan beragama, serta tidak memiliki rasa patriotisme (Kader, 1987:21).

PEMBAHASAN

Peran Perempuan Mesir pada Masa Kolonial/Neo-Kolonial

Kemegahan *hareem* di Konstantinopel memang sukar dipisahkan dari kemegahan dan kemewahan yang dimiliki Imperium Bizantium, termasuk *hareem* yang berada di Mesir. Ada dua sebab yang terjadi pada akhir abad ke-19 yaitu: *Pertama*, pendudukan Inggris terhadap Mesir pada tahun 1882 yang secara tidak sengaja menstimulasi terjadinya pemberontakan Urabi. Selain itu, disebabkan juga oleh kondisi keuangan negara yang sulit dalam struktur kelas sosial. Sebelum kedatangan Inggris, Turki adalah penguasa wilayah yang sangat penting karena pengaturan pemerintahan di bawah kekuasaan orang-orang Turki. Tidak hanya itu, mereka juga menempati semua tingkatan pejabat administrasi melebihi jabatan kepala suku atau *Syaikh al-Balad*, serta semua jabatan komandan dalam militer. Setelah pendudukan Inggris, Mesir hanya tinggal sisa kedaulatan kekaisaran Ottoman, dan kekuasaan Khedive Tawfiq digantikan oleh Khedive Abbas Helmi II pada tahun 1882 sebagai wakil lokal dari Khalifah Abdul Hamid di Konstantinopel. Akan tetapi, penguasa sebenarnya Mesir dari tahun 1882 hingga 1907 adalah Raja Cromer, seorang agen Inggris dan konsul jenderal. Mereka datang untuk menggantikan Turki dalam segala aspek administratif di pemerintahan dan pos-pos militer. Tidak hanya kehilangan status mereka sebagai sebuah kekuatan yang besar dan paling berpengaruh terhadap kaveling kekuasaan, Turki juga kehilangan kekuatan politik bersamaan dengan kemunduran terhadap posisi dan martabat mereka dalam struktur sosial negara (Kader, 1987:18-19).

Kedatangan Inggris tidak hanya menggantikan posisi Turki dalam hal kekuasaan, tetapi juga di bawah perintah Raja Cromer, peraturan mengenai posisi di pemerintahan diubah secara total. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang-orang Mesir berbondong-bondong datang untuk menempati posisi-posisi administratif dalam pemerintahan. Sebagai hasil dari perubahan ini, bermunculan orang-orang Mesir borjuis administratif baru dan kelas baru dari orang-orang Mesir datang untuk menggantikan posisi kaum ningrat tua Turki-Mesir sebagai golongan atas masyarakat (Kader, 1987:19).

Kedua, sebelum pendudukan Inggris, Mesir masih erat kaitannya dengan pergundikan. Di pasar budak misalnya, para budak perempuan diklasifikasi berdasarkan warna kulit, jika berkulit putih maka harga dan permintaan naik, sedangkan budak yang berkulit coklat atau gelap dan hitam di bawah dari harga kulit putih. Akan tetapi, setelah pendudukan orang-orang Inggris, penjualan budak dengan menyediakan gundik-gundik

merupakan bisnis yang subur di Mesir selama abad ke-19 itu secara resmi telah dilarang. Meskipun tidak serta merta hilang secara total, tetapi ada perubahan cara pandang masyarakat mengenai persoalan tersebut (Kader, 1987:19).

Perempuan Mesir pada Masa Kolonial

Ada dua definisi mengenai kolonialisme yang dipaparkan dalam anak subbab ini, dengan maksud mengarahkan pembaca pada definisi yang dijelaskan oleh Rachel Bailey Jones, agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman tentang definisi yang dimaksud dalam tulisan ini dan proses penjabaran mengenai peran perempuan pada masa pra-kolonial, kolonial/neokolonial, dan postkolonial.

Dalam bukunya yang berjudul *Colonialism/Postcolonialism*, Ania Loomba (2005:7-8) berpandangan bahwa kata kolonialisme menurut kamus *Oxford English Dictionary (OED)*, berasal dari bahasa Romawi “colonia” yang memiliki arti “tanah pertanian” atau “pemukiman”. Awalnya didefinisikan sebagai aktivitas bermukim yang dilakukan oleh sekumpulan orang dalam sebuah negeri baru dan menjadi sebuah lokalitas baru, tetapi sama sekali tidak menyebutkan tentang orang-orang selain para pemukim, yaitu orang-orang yang telah lebih dulu mendiami tempat tersebut di mana koloni-koloni itu dibentuk sehingga kata ‘kolonialisme’ tidak mengandung implikasi adanya pertemuan antara rakyat-rakyat, adanya penaklukan, atau dominasi. Akan tetapi, definisi ini mengalami perkembangan setelah tulisan Shakespear menggambarkan bahwa di Kepulauan Bermuda telah ada penduduk sebelum kedatangan Prospero. Proses “membentuk sebuah komunitas” di dalamnya terdapat proses “membubarkan” atau membentuk kembali komunitas-komunitas baru, dan terjadi banyak praktik-praktik seperti perdagangan, penjarahan, negosiasi, perang, pembunuhan, perbudakan, serta pemberontakan. Dari praktik-praktik seperti ini kemudian kata “kolonialisme” didefinisikan sebagai penaklukan dan penguasaan atas tanah dan benda rakyat lain.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, terminologi kolonial merupakan istilah yang digunakan di Eropa dan Amerika untuk menggambarkan bahwa orang-orang Eropa dan Amerika sebagai sentrum dan selain mereka adalah orang non-Barat, dunia ketiga (istilah bangsa inferior), dan belum berkembang. Semua istilah itu secara tidak langsung dinyatakan sebagai sebuah hierarki terhadap wilayah yang menjadikan Barat berada di posisi atas dan selain Barat berebut untuk menjangkau status ke-Barat-an, di mana Barat dijadikan norma

karena semua kultur lain dan orang lain sebagai perbandingan. Deskripsi-deskripsi kolonial terhadap pribumi, lokal, primitif, bengis, dan eksotik adalah istilah yang digunakan untuk mengarahkan perbedaan dalam sebuah hubungan yang spesifik kepada kekuatan. Ide-ide mengenai modern, beradab, dan berkembang hanya ada di Eropa dan Amerika, dan siapa saja yang berusaha menjadi seperti “kita” itu pun masih dalam perbedaan pembahasan dalam hal politik dan kemanusiaan. Bahkan banyak istilah geografis yang secara umum digunakan dalam berita merupakan hasil dari sisa-sisa kolonial dan era penjajahan seperti, istilah “Timur Tengah” adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Eropa dalam hubungan untuk memberikan jarak dari orang-orang Eropa sebagai pusat geografis (Jones, 2011:5).

Dalam hal pendidikan juga tidak lepas dari proses kolonialisasi. Barat melihat bahwa pendidikan sebelum kedatangan mereka merupakan pendidikan yang berada pada kerugian dan kehilangan manfaat, terutama bagi perempuan yang tidak diberikan fungsi lebih bagi masyarakat umum. Barat menitikberatkan pendidikan pada persoalan mental, di mana dari pendidikan itu membangkitkan mental superior terhadap orang Mesir atau sekolah Muslim yang tidak bersentuhan dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat menghasilkan perbedaan jenis budaya dan moral dasar dengan dunia Muslim secara umum. Pendidikan dan budaya Barat yang terjadi pada masa kolonial ini terus dipaksakan hingga struktur sosial berubah dan berasimilasi dengan karakteristik moral Barat (Heyworth-Dunne, 1938: 436-437).

Pemerintah pertama membangun sekolah utama bagi perempuan pada tahun 1873, tetapi tidak sampai tahun 1921 sekolah kedua bagi perempuan dibuka. Pada dasarnya, semua sekolah bagi perempuan berada di wilayah perkotaan dan paling banyak terletak di wilayah Kairo. Sekolah utama dan kedua ini pada kemudian hari tersedia di wilayah pedalaman, dan beberapa anggota dari elit politik saat ini menghadirkan mereka (Sullivan, 1987: 26).

Selain dari pengaruh model pendidikan yang sekuler, Barat sebagai pemerintah kolonial memperkenalkan hukum pidana dengan membedakan antara penjara laki-laki dan perempuan, memisahkan mereka, dan merancang pengobatan yang tepat bagi masing-masing kelompok, sebagaimana perbedaan yang tidak hanya memperjelas sikap atau posisi perempuan, tetapi juga mengatur beberapa pola besar dari segregasi kelembagaan berdasarkan jenis kelamin (Tucker, 1985:134). Secara sadar atau tidak, perempuan

dilibatkan dalam melakukan pemberontakan dan protes. Tidak heran jika yang terjadi adalah pecahnya kerusuhan di Mesir pada bulan Maret 1919 ketika orang-orang Inggris yang telah menduduki provinsi bekas kekuasaan Ottoman pada tahun 1882 dan mendeklarasikan Mesir sebagai negara di bawah pengawasan pada permulaan Perang Dunia (PD) I. Para pemimpin Wafd yang berusaha mencari dukungan masyarakat Mesir untuk mendapatkan kemerdekaan pada pembicaraan perdamaian di Paris ditahan dan dideportasi (Baron, 2005:1). Tidak hanya para pemimpin Wafd saja, para perempuan Mesir juga berusaha menuntut kemerdekaan terhadap Mesir. Menurut catatan para sejarawan, perempuan Mesir selalu menjadi bagian dalam demonstrasi ini. Perempuan Mesir yang berprofesi sebagai petani dan kelas bawah perkotaan berpartisipasi dalam demonstrasi publik terhadap ketidakadilan dari ekspedisi Prancis dan melakukan aksi huru-hara terhadap kenaikan harga dan tenaga kerja selama masa Mohammad Ali. Meskipun perempuan berjuang untuk hak para lelaki daripada untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga berpartisipasi dalam aksi huru-hara dan demonstrasi (Marsot via Kader, 1987:73).

Partisipasi perempuan Mesir pada revolusi tahun 1919 bagaimanapun juga merupakan peristiwa yang selalu mendapat perhatian lebih dari para sejarawan (Baron, 2005:107, Kader, 1987:73). Inilah peristiwa yang pertama kali terjadi di negara yang memiliki sejarah *hareem*. Perempuan kelas atas berpartisipasi dalam aksi ini ketika kerudung dan pakaian hitam menutup seluruh badan dari kepala hingga kaki. Mereka membanjiri jalan-jalan Kairo untuk memprotes kebijakan Inggris. Dengan peristiwa pada tahun 1919, para perempuan dapat melihat kembali perdebatan intens yang hampir dua puluh tahun mengenai isu emansipasi mereka. Peranan politik dari para perempuan ini tidak hanya berakhir pada saat aksi demonstrasi dan perlawanan, tetapi juga berlanjut hingga 1924 (Kader, 1987:73).

Data sejarah mengenai kontribusi perempuan Mesir terhadap perang dan revolusi memberikan banyak potret perempuan sebagai pejuang, prajurit, propagandis, dan patriot. Potret ini memperbaiki kesalahan perempuan-perempuan Mesir dalam data sejarah dan menawarkan gambaran perempuan yang aktif dan heroik yang kontras dengan citra mereka yang secara implisit seperti berada dalam kekurangan sebagai kaum yang pasif, tidak berpolitik, dan pemalu. Akan tetapi, mereka pada masa revolusi ini mampu melampaui deskripsi, naiknya analisis data kesejarahan terhadap ekspektasi mengenai perempuan disebabkan oleh keadaan darurat perang dan revolusi (Kader, 1987:73).

Reaksi kaum laki-laki terhadap demonstrasi perempuan terbukti lebih positif berdasarkan data. Delapan tahun sebelumnya, ketika perempuan Mesir mencoba memasuki ruang publik – universitas nasional baru – mereka dicela dan dihalangi oleh segregasi kelas, bahkan sehari ketika universitas secara resmi ditutup protes itu masih terjadi. Akan tetapi, saat ini perempuan telah memasuki ruang publik yang menjadi penyebab naiknya rasa nasionalisme (Baron, 2005:113-114).

Perempuan Mesir pada Masa Neo-Kolonial

Revolusi tahun 1952 mengawali bagian baru dalam kehidupan Mesir, tetapi bagi perempuan periode yang telah dimulai dari tahun 1935 tidak berakhir hingga 1956 pada saat konstitusi baru memberikan perempuan hak untuk memilih. Sekitar tahun 1956 hingga 1979 perempuan memiliki cara baru agar dapat berpartisipasi di dalam kehidupan publik di Mesir dengan mengawali urusan-urusan pribadi mereka, memasuki parlemen, serta diangkat untuk menduduki kabinet. Hal ini pun semakin memperjelas eksistensi mereka. Kebanyakan perempuan menjadi semakin aktif dalam banyak bidang, terutama dalam profesi yang umumnya digeluti peralasan (Sullivan, 1987: 23).

Meskipun demikian, usaha yang dilakukan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka tidak berjalan mulus dan selalu fluktuatif, terkadang di satu sisi mereka dapat menentukan sikap, tetapi di sisi lain mereka terikat oleh kepentingan yang mengatasnamakan negara. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1960, sekelompok perempuan hanya dimasukkan ke dalam organisasi politik yang legal pada satu waktu yaitu Perserikatan Sosialis Arab, dan banyak aktivitas perempuan yang bergerak dalam isu kesejahteraan diambil alih oleh negara. Dengan kata lain, pada dasarnya aktivitas feminis dibatasi untuk melayani kepentingan partai dan negara (Sullivan, 1987: 23).

Meskipun begitu, organisasi-organisasi feminis setidaknya telah diberikan ruang oleh rezim yang berkuasa. Langkah dan jangkauan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah disesuaikan dengan pencapaian yang telah mereka perjuangkan sebelumnya, terutama dalam hal pendidikan. Setelah tahun 1970 ketika Anwar Sadat menjadi presiden Mesir, dorongan dan desakan itu cenderung terlihat pada rezim yang berkuasa, terbukti dengan sikap yang dilakukan oleh Jihan yang tidak lain adalah istri presiden yang juga merupakan seorang feminis yang sangat bersemangat, dia menjadi fokus kesalahan sekaligus pujian terhadap sikap yang dia lakukan dengan masuk sebagai seorang

tokoh publik dan seorang yang mendesak hak pribadinya sebagai seorang perempuan. Periode 1956-1970 ditandai dengan perempuan yang memperoleh hak pilih dan dengan dukungan presiden yang kuat, undang-undang status personal pun diperbaharui. Selain itu, perempuan diberikan jaminan tempat dalam semua pertemuan-pertemuan pemilihan Mesir (Sullivan, 1987: 24).

Setelah 1979, perempuan Mesir melanjutkan beberapa persoalan yang belum terselesaikan. Bagaimana pun juga, aturan baru yang telah ditambahkan seperti mempertahankan dan mengonsolidasikan hak-hak yang ditetapkan dan mempertahankan posisi perempuan dari “penyerangan” secara halus. Hal itu dibuktikan dengan status *quo* yang telah didukung oleh sebagian besar masyarakat, rezim Sadat-Mubarak, dan kebanyakan perempuan yang dipilih atau diangkat untuk jabatan tinggi di publik. Akan tetapi, figur-figur oposisi lainnya termasuk beberapa fundamentalis Islam menganjurkan penetapan perundang-undangan yang secara umum akan membatasi aturan perempuan dalam ranah publik (Sullivan, 1987: 24).

Banyak sejarah pasca-revolusi Mesir yang mengungkapkan bahwa untuk menjadi oposisi merupakan tindakan yang berbahaya, tetapi ada rasa terpuaskan dalam diri ketika berada pada posisi tersebut. Beberapa politikus yang berposisi mungkin adalah penipu dan oportunist, mencari beberapa orang penting untuk mendapatkan keuntungan, tetapi banyak juga pemimpin yang jujur terhadap sikap oposisi mereka. Beberapa dipenjarakan dan semua mendapatkan penderitaan dengan berbagai cara karena kritik dan sikap oposisi mereka terhadap pemerintah, tidak terkecuali para perempuan (Sullivan, 1987: 123).

Pelarangan hukum untuk mencegah kesetaraan perempuan mengakses ruang publik dan representasi dalam pengadilan telah ditinggalkan. Larangan-larangan sosial pun membatasi akses mereka untuk profesi-profesi tertentu. Pada saat bersamaan, meningkatnya kemiskinan dan penderitaan menjadikan kaum perempuan dan keluarga mereka sebagai korban, membatasi pilihan mereka, serta mereduksi peluang mereka untuk menyatakan hak mereka. Munculnya konservasi sosial terhadap kesadaran gender dan meningkatnya perampasan hak, akhirnya merusak kemampuan perempuan untuk menerjemahkan hak legalnya ke dalam kehidupan nyata (Tadros, 2010: 89).

Pada pemilihan parlemen tahun 1984 terdapat lebih dari 140 perempuan yang menjadi kandidat untuk jabatan tersebut. Sekitar 75% perempuan yang bersaing berada dalam kepentingan partai oposisi, tetapi hanya dua yang berhasil merepresentasikan Partai

Wafd Baru (NWP) yaitu Olfat Kamel, seorang politikus kawakan Mesir dan anggota parlemen yang *incumbent*, dan Rizqah al-Balashi, seorang pekerja sosial dari Alexandria yang pencalonannya sangat didukung oleh Ikwanul Muslimin, dan menjadi anggota 33 perempuan NDP (National Democratic Party) yang dipilih masuk ke dalam Majelis al-Shaab. Kedua perempuan ini terhadang berbeda meskipun mereka merupakan anggota partai yang sama dan mereka membantu mengilustrasikan perbedaan dan kadang-kadang posisi mereka paradoks dalam sikap oposisi di Mesir (Sullivan, 1987: 110).

Pada umumnya, pemimpin oposisi perempuan memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan rekan mereka yang ada di parlemen, 43% dari mereka memiliki gelar universitas dibandingkan dengan 63% dari kelompok oposisi perempuan lain. Mereka yang memiliki gelar juga dikelompokkan dalam beberapa bagian, sekitar 38% memperoleh gelar doktor dan magister, mengingat hanya 10 persen perempuan yang menjalankan parlemen, tetapi mereka yang tidak termasuk dalam kelompok oposisi perempuan pada akhirnya melakukan hal yang sama (Sullivan, 1987: 111).

Bagi para lelaki tidak ada persoalan dalam hal mengakses kehidupan publik, terutama pendidikan, tetapi bagi perempuan pendidikan merupakan kebutuhan kondisi untuk mencapai kesuksesan. Baru terbukanya akses pendidikan bagi perempuan mengindikasikan bahwa pada hakikatnya semua berkembang dalam kondisi perempuan di Mesir sejak 1960 disebabkan oleh satu faktor yaitu pendidikan (Sullivan, 1987: 156).

Pendidikan adalah suatu hal yang jelas baik dan sejauh ini orang-orang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Banyak yang tumbuh dan berkembang dari keluarga yang berpendidikan, tetapi mereka tidak menggunakan pendidikan sebagai faktor utama untuk mencapai posisi yang lebih mapan, terutama perempuan yang saat ini berada di parlemen dan anggota politik yang beroposisi. Pendidikan perempuan dalam status pekerjaan disimbolkan dengan pola penguasaan tiga bahasa. Kurang lebih 25% anggota parlemen telah mencapai gelar doktor, memperoleh gelar dalam hal ilmu kimia, ilmu sastra, kedokteran, dan kedokteran gigi. Perempuan yang berada di Majelis al-Shura terhitung sekitar 3.3% jumlah anggotanya dan 8.1% bergelar doktor. Meskipun begitu, pola pendidikan di antara lelaki dalam elit politik tetap dipandang tidak imbang dengan perempuan. Kehadiran perempuan di parlemen merupakan bentuk penghormatan meskipun jumlah mereka tidak seimbang dengan lelaki karena superioritas yang dimiliki lelaki. Istri presiden dan perempuan yang beroposisi juga menunjukkan bahwa mereka

adalah orang-orang yang terdidik, di antaranya adalah istri Nasser yang memiliki kemampuan penguasaan tiga bahasa, istri Saddat dan Mubarak telah memperoleh gelar dan hampir dua per tiga dari oposisi perempuan digambarkan sebagai orang yang intelektual. Hal ini menandakan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perempuan Mesir saat ini (Sullivan, 1987: 156).

Perempuan Mesir di Bawah Rezim Gamal Abdel Nasser

Sebagai presiden republik pertama, Gamal Abdel Nasser dinilai sebagai rezim yang otoriter dan penindas terhadap kelompok oposisi yang terorganisir. Berbagai pelajar mendesak agar revolusi Mesir 1952 mengukuhkan abad baru bagi perempuan dengan mengubah struktur kelas, ideologi, dan undang-undang. Secara praktiknya, adanya pencantuman perempuan dalam negara baru (Ahmed, Hatem via Ali, 2004:67). Seperti dua sisi mata uang yang sukar dipisahkan, di satu sisi Nasser berkomitmen terhadap kesejahteraan perempuan sebagai bagian dari perjuangannya bagi keadilan sosial. Selain itu, dia juga merancang sistem perundang-undangan pasca-kolonial Mesir dengan menjamin hak pilih bagi perempuan sebagaimana dalam pasal 31 menyebutkan “bahwa tidak ada diskriminasi terhadap nilai-nilai gender, asal, bahasa, atau kepercayaan.” Di sisi lain, melakukan penindasannya terhadap aktivis perempuan dan melarang segala model aktivis politik yang independen termasuk organisasi feminis (Ahn, 2014: 9; Ali, 2004: 67).

Sebagai seorang aktivis sosialis, Leila I menggambarkan bagaimana gerakan perempuan selama periode Nasser:

*“During the Nasser time, the movement was hit. There were women in the institution of the regime: careerists. These women only represented the pragmatic needs of the Nasser regime. These were only women who spoke about women’s right: **Haqq al-Mar’a Bil Ta’lim** (women’s right to education), for example, or **Tahrir al-Mar’a** (the emancipation of women). They would say that reactionaries were against **Tahrir al-Mar’a**. they were mainly listening to the authorities. There was the regime supporting change and women were making propaganda for the regime, but women were not allowed to be organized”* (Ali, 2004: 67).

Deskripsi gerakan perempuan tidak bisa lepas dari kontrol rezim Nasser, setiap isu-isu perempuan yang digalakkan dikooptasi oleh negara. Hal ini juga yang menyebabkan berkurangnya independensi organisasi feminis. Tidak hanya menjalankan konstitusi 1956 dan merevisinya pada tahun 1963 dengan menyatakan bahwa semua orang-orang Mesir setara tanpa memperhatikan gender, tetapi juga tugas undang-undang diubah agar negara

menjamin bidang pekerjaan bagi ‘semua pemegang ijazah sekolah menengah atas dan sarjana perguruan tinggi tanpa memikirkan gender’ (Ali, 2004: 67-68). Selain itu, pada tahun 1956 negara menjamin hak perempuan untuk memilih dan maju dalam pertarungan politik. Sistem pendidikan telah direformasi untuk menaikkan jumlah pendaftaran, bagi pendidikan dasar dan pendidikan sekunder, yang utama melibatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan yang lebih tinggi (Ahmed via Ali, 2004: 68).

Banyak perempuan yang memberikan pendapat mereka tentang bagaimana posisi dan peran mereka di bawah pemerintahan Nasser. Selain Leila, ada juga Sheeren M yang mengungkapkan bagaimana ide kesetaraan perempuan sangat ditentang pada periode Nasser:

“The Nasserist discourse of equality and fraternity masked a lot of inequality. This was the atmosphere I grew up in. The work laws had changed, copying communist countries. When it came down to reality I felt that there was so much hypocrisy. I was brought up to be independent, but when I think carefully I had to resist everything I was brought up with” (Ali, 2004: 69).

Perempuan Mesir di Bawah Rezim Anwar Sadat

Peran negara di bawah Sadat sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi tereduksi karena menarik kebijakan politik kesetaraan sosial dan kesetaraan kesempatan dengan mendesentralisasikan pembuatan kebijakan ekonomi dan meningkatkan partisipasi di sektor privat. Tidak hanya banyak dari janji-janji Nasser mengenai kesetaraan gender yang ditinggalkan, tetapi juga kebijakan politik *infitab* yang digunakan meningkatkan disparitas antara yang kaya dan yang miskin. Kekuasaan Sadat dengan kebijakan *infitab*-nya mengundang para investor Barat dan Arab. Liberalisasi ekonomi akan dihubungkan dengan pengurangan dari banyak tekanan yang dilakukan oleh otoriter Nasser, sebagaimana Mesir akan menyusun kembali mekanisme ekonomi sosialis yang telah dibangun di bawah kekuasaan Nasser (Baker via Ali, 2004: 71).

Kebijakan politik *infitab* Sadat merupakan cara yang berbeda dalam memengaruhi perempuan. Pengintegrasian para perempuan ke dalam perekonomian yang telah menjadi bagian dari ‘negara feminism’-nya Nasser, di bawah kebijakan Sadat telah diubah dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan ketidaksetaraan kesempatan dalam dunia kerja. Di sisi lain, tenaga kerja migrasi – terutama mereka yang dari negara-negara teluk – tidak hanya memberikan perbaikan ekonomi dan mengubah standarisasi kehidupan bagi banyak

keluarga, tetapi juga memaksa banyak perempuan mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab suami mereka (Hatem via Ali, 2004: 71-72).

Kebijakan *infatab* Sadat menimbulkan efek yang berbeda bagi perempuan terutama terhadap posisi dalam kerangka kelas sosial. Perempuan kelas menengah ke atas dan kelas atas umumnya mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan para perempuan kelas menengah ke bawah dan kelas pekerja. Perubahan sosial dan ekonomi disebabkan oleh *infatab* dihubungkan dengan berjaraknya Mesir dari Uni Soviet dan saling membangun relasi dengan Amerika (Ali, 2004: 72).

Undang-undang status personal 1979 dilabeli 'Jehan's Law' – karena Jehan telah memberikan sumbangsih dalam mengusulkan perbaikan terhadap undang-undang yang mengatur status personal – telah menjamin hak hukum perempuan dalam hal pernikahan, poligami, perceraian dan tahanan anak. Hal ini diimplementasikan melalui keputusan presiden bersamaan dengan undang-undang yang lain yang memasukkan perubahan terhadap representasi perempuan di parlemen. Aktivistis perempuan lain keberatan jika mengaitkan Sadat dengan kemajuan undang-undang (Ali, 2004: 74) dengan mengatakan:

"Jahan's Law was only a very small element of the Sadat regime. When we speak about Sadat, we speak about a general policy. For me, Sadat is responsible for the growth of the Islamist tendency. He armed and trained them and ended up being killed by them. The general policy under Sadat was against the possible liberation of women. Madame Jehan, on the other hand, manage to pass the new Personal Status Law. It was a good law, but it didn't last. It was changed. The point is: were organizations allowed during Sadat? We must admit the importance of the student movement which was against Sadat. He has no credit whatsoever for organizations (Ali, 2004: 74)".

Perempuan pada dasarnya tidak memiliki kebebasan dalam organisasi yang merepresentasikan diri mereka dan tergantung pada berbagai kebutuhan rezim penguasa. Pada tahun 1975 merupakan awal dekade PBB bagi perempuan. Hal ini menjadi penyebab rezim yang berkuasa melakukan hubungan politik yang kuat dengan sekutu yang baru, terutama Amerika, untuk mempromosikan isu-isu gender. Meskipun mengalami kemajuan undang-undang 1979, negara mengurangi semua program yang menjamin hak-hak perempuan dan tidak mendorong kebebasan aktivis feminis (Ali, 2004: 74).

Perempuan Mesir di Bawah Rezim Husni Mubarak

Kemunculan kembali aktivis perempuan di bawah rezim Mubarak pada dasarnya dikaitkan dengan keberlanjutan pertarungan atas undang-undang status personal dan

mengangkat isu-isu yang secara formal masih tabu seperti kontrasepsi dan sirkumsisi (Ahmed via Ali, 2004: 75). Selain menjadi mahasiswa kedokteran dan kemudian berprofesi sebagai dokter pada masa kepemimpinan Nasser, Nawal el-Sa'dawi juga menjadi salah satu penantang yang paling awal dan yang sangat kuat dari modernis-nasionalis. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Perempuan dan Kelamin (*المرأة و الجنس*/women and sex, 1971), Nawal menyinggung kontrol patriarki terhadap seksualitas perempuan. Dia membuat isu-isu tabu seperti sirkumsisi bagi perempuan, isu-isu kekerasan seksual dan eksploitasi publik, serta menginisiasi jenis feminisme yang berbeda dengan tren-tren sebelumnya. Mayoritas aktivis sekarang menjauhkan diri mereka dari aktivismenya Nawal karena mereka melihat pandangannya 'sangat ke-Barat-an', 'sangat radikal', 'sangat kiri', atau karena 'sangat otoriter'. Mereka hanya sebagian kecil yang tidak mengakui perjuangan Nawal, dampak yang telah dia berikan bagi beberapa generasi, dan perannya dalam merintis perjuangan terhadap perempuan (Ali, 2004: 76-77).

Melalui wawancara yang dilakukan Naje al-Ali (2004: 78), Nawal el-Sa'dawi mengekspresikan kemarahan dan kekecewaannya yang ditujukan kepada pemerintah dan para Islamis yang dianggap bahwa merekalah penyebab dirinya terasingkan. Berikut pernyataannya:

We don't want the older ones and we start from zero. There is no continuity. And this is why there's no history. In the national movement they've a history. The history must be known, there must be building. Everyone speaks about Hoda Sha'rawi, but they are afraid to mention anybody else. She was conservative and pro-regime. She was very bourgeois. These are the women who are considered by the regime. There is an official history; you don't find a non-governmental history of women. Most of my work is in Arabic, but only when I travel abroad they mention my name, when they talk about 'foremother' of the feminist movement, they mention me.

Para aktivis perempuan terdahulu termasuk Nawal merasa bahwa perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak perempuan dalam kerangka nasionalis dan anti-imperialisme dikesampingkan oleh kelompok perempuan profesional muda yang menganggap bahwa gerakan mereka lebih banyak menjurus kepada feminisme radikal Barat. Bahkan banyak dari mereka – para kelompok feminis baru – berselisih dengan kritik-kritik dan organisasi – *Arab Women's Solidarity Association (AWSA)* – Nawal yang sangat menonjol dan konfrontatif, serta secara terang-terangan mengkritisi posisi Islamis dalam gender (Ali, 2004:78-79; Badran via Ali, 2004: 79).

Peran Perempuan Mesir pada Masa Pascakolonial

Kehadiran post-kolonial merupakan tindakan dasar mengkritik penguasaan orang-orang Eropa dan Amerika terhadap informasi dan kekuatan melebihi mereka yang berbeda wilayah dan budaya. Struktur kolonial Eropa menetapkan sebuah hierarki dalam masyarakat, kecerdasan, dan dalam hal membangun sebuah ‘tempat’ di mana Barat diposisikan unggul dan sisanya beragam berada di tataran terendah dalam hierarki. Post-kolonial digunakan untuk menggambarkan resistensi secara langsung terhadap penguasa kolonial dengan mengangkat senjata dan berjuang demi kemerdekaan dan juga merupakan teori kritis terhadap bentuk pengetahuan *Eurocentric* yang dibangun dengan landasan penguasaan kolonial (Jones, 2011:15).

Pada dasarnya teori post-kolonial digunakan dalam bentuk penulisan dan teori akademik. Kegunaan pertama yaitu untuk menggambarkan perebutan wilayah secara geografis dan pergerakan kemerdekaan nasional yang menggantikan aturan langsung kolonial. Post-kolonial dalam bentuk ini secara literari dapat diambil sebagai sebuah era mengikuti langsung pendudukan dan aturan asing. Istilah ini secara metafora belakangan dijadikan akar untuk menggambarkan bentuk yang spesifik dari kritik yang mengekspos hierarki dan hubungan kekuasaan kolonial antara pusat (istilah untuk menggambarkan posisi Eropa dan Amerika sebagai yang mendominasi budaya) dan yang terpinggirkan (istilah untuk menggambarkan suara minoritas atau sebagai kelompok masyarakat “dunia ketiga” dan “berkembang”). Penulis, pemikir, atau seniman post-kolonial metaforis merupakan seseorang yang membangun sebuah sikap oposisi dalam menghadapi rasis, elitis, dan cara berfikir *Eurocentric* (Jones, 2011:24).

Konstruksi dan Resistensi Perempuan di Mesir Pascakolonial

Post-kolonial di banyak negara-negara MENA telah menampilkan marginalisasi bagi para perempuan. Barat maupun lelaki di MENA mengarahkan interpretasi agama, masyarakat, dan politik pada saat ini berhadapan dengan tantangan yang berbeda dari bangkitnya identitas baru yang sebelumnya bukan sesuatu yang menarik dalam wacana kolonial. Ketidakstabilan politik pasca-kolonial negara bangsa cenderung mengabaikan suara para aktor baru yang muncul dalam masyarakat. Sementara itu, perempuan yang dikatakan sebagai aktor baru ini membangun ketertarikan dan berusaha meletakkan posisi mereka dalam visi ke depan di tengah pengarahan kolektivitas masyarakat. Pengarahan

masyarakat terhadap perempuan Muslim untuk menyuarakan posisi mereka yang sebagian besar dibungkam oleh wacana Eropa dan ini merupakan sebuah usaha untuk melindungi kepentingan Eropa dalam proses transformasi (Ahn, 2014:7).

Hal tersebut sejalan dengan Spivak yang mengatakan “*Women, as either colonial or postcolonial subject, or as postcolonial actors, have been marginalized or completely omitted.*” Dalam hal ini, Spivak tidak memfokuskan relasi gender dari kolonialisme, tetapi pada asumsi teoretis poskolonial terhadap maskulin subjek (Jones, 2011: 32). Identitas perempuan sekarang meningkat dengan meletakkannya di dalam proses nasionalisasi yang berperan sebagai aktor sosial dan ditetapkan untuk membatasi sudut pandang dalam hal: pertama, secara biologis sebagai orang yang melahirkan kolektivitas etnik; kedua, yang melahirkan batas antara etnik atau sekelompok bangsa; ketiga, pengantar reproduksi ideologi; keempat, simbol dari wacana ideologi untuk menguatkan etnik atau perbedaan bangsa; dan terakhir, partisipan dalam hal kenegaraan, ekonomi, politik, dan kekuatan militer (Ahn, 2014:7-8).

Konstruksi identitas perempuan di MENA bersamaan dengan terjadinya proses pembangunan bangsa di wilayah di mana posisi sosial politik dan kepentingan sekelompok perempuan sering diposisikan rendah oleh kontrol proyek nasionalisasi. Representasi perempuan dan peran gender dalam masyarakat pasca-kolonial dikonsepsikan melalui budaya patriarki, *misogynic*, dan nilai-nilai yang semuanya berasosiasi dengan aturan gender yang dikotomi di mana letak kekuasaan dan produksi sosial membatasi ruang geraknya pada pusat dominasi lelaki di ranah publik (Ahn, 2014:8).

Tidak berbeda dengan penjelasan sebelumnya, Rosaldo (via Jones, 2011: 34) berpendapat bahwa menghubungkan ruang domestik sebagai sifat perempuan dan dunia publik sebagai sifat laki-laki membuat perbedaan hierarki yang jelas antara bidang pengaruh; dunia publik termasuk di dalamnya budaya, politik, dan keputusan ekonomi dan menjelaskan kontrol lebih terhadap ruang domestik perempuan. Ruang privat secara kultural diasosiasikan dengan tidak berdayanya seseorang (perempuan dan anak-anak) dan ter subordinasi dari ruang publik ketika lelaki mendikte hukum, menguasai berbagai urusan, mengatur negara, dan mengontrol perekonomian, baik di ranah publik maupun di ranah domestik (keluarga). Perempuan juga memiliki *power* meskipun hanya di ranah domestik contohnya perempuan tertua dalam keluarga menentukan kebijakan ekonomi rumah tangga bahkan sampai pada tingkatan menentukan siapa menikahi siapa. Seperti itulah konsesus yang terjadi di MENA (Sadiqi dan Ennaji, 2011: 3).

Salah satu karakteristik yang signifikan dari pembersihan nama terhadap hak asasi perempuan dalam perpolitikan Mesir pada abad ke-20 adalah dengan mempertemukan antara berbagai perbaikan legislatif yang memperhatikan norma-norma tradisi legal dan mempertahankan sebuah kerangka otoriter atau fundamentalis, dan berangsur-angsur melakukan perubahan dalam perundang-undangan, sementara sisanya berada dalam lingkup sosio-religius yang lebih luas hingga saat ini (Ahn, 2014:9).

Sejak hukum status perseorangan didasarkan pada syariat (hukum Islam), maka kunci untuk menentang ketetapan status perseorangan yang diskriminatif berpotensi munculnya interpretasi yang berbeda terhadap Alquran. Pada tahun 2008, Zainab Radwan seorang juru bicara Majelis Rendah Parlemen dan seorang ahli hukum Islam menguji interpretasi ayat-ayat Alquran yang sering dilibatkan untuk menyangkal kesamaan muatan terhadap kesaksian perempuan. Seorang perempuan berpendapat bahwa ayat-ayat “disesuaikan dengan situasi yang spesifik yang mana perempuan tidak diperbolehkan membaca pada waktu itu dan dapat juga melupakan bagian-bagian dari peristiwa karena apa yang mereka berikan merupakan kesaksian verbal, bukan tertulis.” Kemerdekaan yang penting dan pelajar yang terhormat seperti Mahmoud Bassiyouny yang mendukung pandangan ini, tetapi menggunakannya dalam perdebatan parlemen merupakan sikap permusuhan yang tinggi dengan pembuat undang-undang, terutama bagi mereka yang mewakili kelompok Islamis (Tadros, 2010: 93-94).

Selain itu, Mesir juga telah mengesahkan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1981, yang menghasilkan perubahan terhadap beberapa pasal, di antaranya pasal 9(2) mengenai status kewarganegaraan; pasal 16 mengenai pernikahan; pasal 29(2) mengenai penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan konvensi; dan pasal 2 mengenai penghapusan diskriminasi gender. Meskipun undang-undang nasional menjamin keamanan dan otonomi personal perempuan, pemerintah dan aktor pribadi tetap saja meruntuhkan hak ini dalam praktiknya (Tadros, 2010:94-95).

Dalam konstitusi pasal 18 menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak yang dijamin oleh negara dan wajib melalui sekolah dasar. Seperti halnya teman lelaki mereka yang sebaya, murid perempuan memiliki kebebasan untuk mengakses pendidikan publik pada semua level, tetapi terkadang mampu untuk mengambil kesempatan hak ini seperti urusan praktikum. Orang tua yang kekurangan uang sering mengirim anak mereka untuk

bekerja sebagai pedagang jalanan di umur yang masih muda. Berdasarkan jumlah pada tahun 2006 terdapat 87,9% lelaki yang melek huruf berumur 15 hingga 24, dibandingkan dengan perempuan yang hanya berkisar 81,8%. Bagaimana pun juga, remaja perempuan yang melek huruf secara drastis lebih baik dari tahun 2005 yang hanya berkisar 78,9%, sedangkan remaja laki-laki yang melek huruf menurun dari yang tadinya sekitar 90,1%. Keterpisahan gender dalam persoalan melek huruf ini memperlebar jarak di antara generasi-generasi yang lebih tua, tercatat jumlah lelaki dewasa yang melek huruf hanya 74,6% dan 57,8% perempuan dewasa pada tahun 2006 (Tadros, 2010: 103).

Subjek kolonial biasanya diasumsikan kepada laki-laki sedangkan bentuk-bentuk resistensi yang melibatkan campur tangan perempuan untuk mengakhiri aturan kolonial termarginalisasi dalam argumen post-kolonial. Dengan memusatkan subaltern perempuan sebagai subjek dari teorinya, Spivak membawa pengalaman perempuan ke dalam analisis postkolonial; teks-teks semasa dalam kajian postkolonial seringkali menyebutkan isu-isu gender dalam beberapa cara, dan yang menjadi perhatian Spivak adalah perempuan yang termarginalisasi sebagai subjek sejarah yang disebabkan oleh dominasi laki-laki (Jones, 2011: 32).

SIMPULAN

Perempuan Mesir dalam konstelasi kenegaraan, baik itu dari segi ekonomi, politik, sosial, kebudayaan bahkan sampai ranah militer, perannya terbagi ke dalam beberapa pembabakan. Pembabakan pertama dimulai dari masa kolonial, neo-kolonial, dan pascakolonial. Pada masa awal kolonial, perempuan Mesir sangat lekat dengan budaya pergundikkan dan perbudakan. *Hareem* adalah produk budaya fenomenal di Mesir yang memiliki nilai historisitas tinggi. Perempuan, baik itu sebagai gundik maupun budak, menjadi barang berharga. Perempuan yang memiliki warna kulit putih harganya lebih mahal dibanding dengan perempuan berkulit gelap. Namun demikian, perempuan Mesir juga melakukan perubahan-perubahan yang memberi pengaruh di sekitarnya. Usaha menuntut kemerdekaan, melakukan perlawanan di kelas bawah kepada penjajah, dan mendorong hak-hak kaum lelaki Mesir menunjukkan peran perempuan Mesir yang cukup signifikan.

Masa berikutnya yakni neo-kolonial. Pada masa ini, perempuan Mesir melanjutkan perjuangannya dengan masuk ke ranah politik. Mereka menduduki kursi parlemen dan mulai menyuarakan pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal itu

kemudian menimbulkan gejolak antara kelompok perempuan dengan pemerintah setempat. Selain isu kesetaraan hak, perempuan Mesir di era neo-kolonial juga memainkan isu lain, yaitu kesejahteraan sosial. Meski belum mampu mendominasi dalam sistem kenegaraan, namun upaya progresif dari kelompok perempuan Mesir ini mampu mendobrak hegemoni kaum laki-laki. Terakhir, di masa postkolonialisme, perempuan Mesir turut andil dalam membidani kolektivitas etnik. Hasil kolektivitas etnik tersebut, mampu melahirkan batas-batas antar etnis dengan sekelompok bangsa. Mereka juga mampu menjadi pengantar dan simbol wacana reproduksi ideologi bagi Mesir serta berpartisipasi dalam kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, B. (2014). *Writing a Her-Story of Egypt: an Illustration of Islamic Women's Movement in Post-colonial Egypt*.
- Al-Ali, N. (2004). *Secularism, Gender and the State in the Middle East: The Egyptian Women's Movement*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Baron, B. (2005). *Egypt as a Women: Nationalism, Gender, and Politics*. Berkeley: University of California Press.
- Bhaba, K. H. (1994). *The Location of Culture*. London and New York: Routledge.
- Epafras, L. C. (2012). *Signifikansi Pemikiran Homi Bhabha: Sebuah Pengantar Teori Pascakolonial*. Disajikan pada acara rangkaian seria; filsafat yang diselenggarakan oleh Extension Course Filsafat (ECF) Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan 9 November 2012.
- Heyworth-Dunne, J. (1938). *An Introduction to the History of Education in Modern Egypt*. London: the Burleigh Press.
- Jones, R. B. (2011). *Postcolonial Representations of Women: Critical Issues for Education*. New York: Springer.
- Kader, S. A. (1987). *Egyptian Women in a Changing Society, 1899-1987*. USA: Lynne Rienner Publishers.
- Loomba, A. (2005). *Colonialism/postcolonialism*. London and New York: Routledge.
- McAll, C. (1992). *Class, Ethnicity, and Social Inequality*. Canada: McGill-Queen's University Press.

- Mikhail, M. (2016, September) <http://www.everyculture.com/multi/DuHa/Egyptian-Americans.html>
- Said, E. W. (1979). *Orientalisme*. New York: Vintage Books A Division of Random House.
- Salaita, S. (2006). *Anti-Arab Racism in the USA: Where it Comes from and What it Means for Politics Today*. London: Pluto Press.
- Sullivan, E. L. (1987). *Women in Egyptian Public Life*. Cairo: The American University in Cairo Press.
- Tadros, M (edt. Kelly, S. & Breslin, J). (2010). *Women's Rights in the Middle East and North Africa*. New York: Freedom House.
- Tucker, J. E. (1985). "Egypt" dalam *Women in Nineteenth-Century Egypt*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walsh, A. (2013). *Science Wars: Politics, Gender, and Race*. New Brunswick and London: Transaction Publishers.

